

## PROGRAM LINGKAR NGOPI DEMOKRASI: PENGINDERAAN DISINFORMASI DAN TELAAH OLIGARKI-ELEKTORAL DI KOTA KUPANG TERHADAP PEMILIH PEMULA 2024

Emanuel Kosat<sup>1\*</sup>, Veronika I. A. Boro<sup>2</sup>, Frans Bapa Tokan<sup>3</sup>, Maximianus Ardon Bidi<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Imu Pemerintahan, Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia  
[kosatemanuel@gmail.com](mailto:kosatemanuel@gmail.com)

### ABSTRAK

**Abstrak:** Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya mitigasi kerentanan pemilih pemula terhadap disinformasi dalam demokrasi berbasis pemilihan umum. Kegiatan berfokus pada penguatan kesadaran kritis siswa sebagai kelompok first-time voters agar mampu mengenali, menganalisis, dan merespons disinformasi serta berbagai bentuk mobilisasi identitas dalam ruang publik. Urgensi program semakin kuat karena pemilih muda pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 52% dari total pemilih, sehingga literasi politik dan kemampuan penginderaan disinformasi menjadi kompetensi bagi kualitas demokrasi. Pendekatan yang digunakan adalah Komunikasi Antarpersonal (KAP) melalui dialog interaktif, fasilitasi, deliberasi, dan kalibrasi gagasan dalam Program Lingkar Ngopi Demokrasi. Peserta berjumlah 100 siswa/i atau taruna/i berusia 17 tahun ke atas yang teridentifikasi sebagai pemilih pemula di SMK Negeri 7 Kota Kupang. Kegiatan mengintegrasikan diskusi kepemiluan, pertukaran pengalaman, serta permainan simulasi pemilu secara berkelompok. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui wawancara, dialog antarpribadi, dan refleksi peserta. Hasil menunjukkan peningkatan kemampuan argumentatif peserta dalam mengidentifikasi dan menganalisis pemberitaan secara kritis, sehingga mampu menentukan sikap dan pilihan politik secara rasional, bijaksana, dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Disinformasi; Pemilu; Pemilih Pemula; Demokrasi.

**Abstract:** This community engagement program was implemented as an effort to mitigate the vulnerability of first-time voters to disinformation within electoral democracy. The program focused on strengthening students' critical awareness as a group of first-time voters so that they could identify, analyze, and respond to disinformation and various forms of identity-based mobilization in the public sphere. The urgency of the program is reinforced by the fact that young voters accounted for approximately 52% of the total electorate in the 2024 Indonesian General Election, highlighting the importance of political literacy and disinformation detection skills for strengthening democratic quality. The program employed an Interpersonal Communication (KAP) approach through interactive dialogue, facilitation, deliberation, and the calibration of ideas within the Lingkar Ngopi Demokrasi program. The participants comprised 100 students or cadets aged 17 years and above who were identified as first-time voters at SMK Negeri 7 Kupang City. The activities incorporated electoral discussions, experience sharing, and group-based election simulation games. Program outcomes were evaluated qualitatively through interviews, interpersonal dialogue, and participant reflections. The results indicated improved argumentative abilities among participants in critically identifying and analyzing public information, enabling them to develop more rational, informed, responsible, and thoughtful political attitudes and choices.

**Keywords:** Disinformation; Election; First Time Voters; Democracy.



#### Article History:

Received: 27-06-2026  
Revised : 24-07-2026  
Accepted: 30-07-2026  
Online : 05-08-2026



This is an open access article under the  
CC-BY-SA license

## A. LATAR BELAKANG

Politik pembelahan ekstrim dalam pemilu tahun 2019 memberi pelajaran yang cukup untuk saat ini dan masa depan. Dikotomi berbasis mobilisasi politik identitas menjadi preseden dominan dalam demokrasi elektoral. Namun alih-alih keluar dari jebakan silam ini tidak boleh serta memberangus dialektika antar warga negara. Sebab pada galibnya di mana pun di dunia ini, demokrasi sebagai wahana kritis deliberatif melauai ruang partisipasi dengan aneka anasir gagasan warga dalam politik sehari-hari (Widiantari & Putra, 2025). Salah satu pembacaan kritis substansial atas demokrasi ialah partisipasi warga melalui opini publik rentan ditunggangi media masa dengan sajian misinformasi, manipulasi, dan provokasi (Lesmana & Marta, 2022).

Kecurangan dan intrik di dalam politik menjadi penting dianalisis, apakah politik sebagai panggilan atau profesi. Jika pilihan dijatuhkan ke yang pertama maka harapan akan ada masa depan kepada *sense of crisis*, *sense of responsibility*, *sense of egalitarianism*, etc. Politik sebagai jalan kemartiran untuk hijrah kepada kefitrahan. Sebaliknya, memilih yang kedua berarti politik sebagai ladang mengumpulkan kekayaan (Winters, 2026; Winters, 2011). Siklus permanennya: politik untuk menjadi hartawan dan berharta demi kuasa politik; menunggangi di satu sisi dan melanggengkan kuasa di sisi lain. Selain itu, fenomena politisasi agama dalam kerangka konsolidasi materil-primordial dengan menempatkan warga negara menjadi tidak saling percaya kepada sesama saudara sebangsa dan malah mengalami kerentanan (Forster, 2005; Hadiz, 2024).

Untuk berebut simpati pemilih, para aktor/elit memanfaatkan informasi berbasis data dari berbagai sumber. Data pemilu yang tepat, jujur, dan logis menjadi rujukan di dalam proses demokratisasi. Kaum muda, ketika menilai kualitas demokrasi untuk menentukan partisipasinya senantiasa memiliki pijak refleksi dari realitas data yang valid. Namun realitasnya disinformasi data dan isu nonnetralitas aparaturnya Negara cenderung marak dalam agenda kontestasi Pemilihan Umum (Izzati et al., 2024; Engler, 2016; Mietzner, 2026). Tabiat pemanipulasian data dan informasi untuk merasionalisasikan proses demokrasi bersinggungan dengan kriterium etika dan moralitas. Motifnya ialah untuk merekayasa imaji publik pada konsensus yang secara monologal telah ditentukan penguasa (Aspinall & Berenschot, 2019; Li, 2025).

Maka kritik etis muncul untuk mempersoalkan modus kebohongan ini. Secara deontologi pengingkaran terhadap data dan informasi pada dirinya merupakan perilaku tidak etis. Berikutnya, secara teleologi yang menekankan pada kemanfaatan (*utilis*) dari sebuah informasi pun patut dicurigai. Dalam fenomena ini, imperatif etis dalam aktivitas mendata dan *information sharing* merepresentasikan pengalaman karakter moral yang melatari kelahiran sebuah informasi. Demikian pula pada kategori penyelenggara pemilu dibutuhkan kecakapan kerja dan kriterium moral

untuk mewujudkan tata kelola pemilu demokratis (Grindle, 2009; Niron et al., 2026; Penyusun & Fahlefi, 2024).

Eksplorasi terhadap deretan data statistik turut mendeterminasi kemenangan elit dan oligarki (Juru, 2013; Warburton, 2024), sebagaimana dalam pemilu 2024 nampak kredibel, obyektif, relevan, dan praktis. Dengan percaya begitu saja pada akumulasi data telah mengerdilkan nalar kritis dan membentuk irasionalitas kaum muda. Faktanya, pemilih pemula telah menjadi target untuk menyebar data dari partai-partai politik guna merebut suaranya sekaligus menjadi kalangan yang paling disorot dalam kontestasi pemilu modern. Pemilih pemula baru memasuki usia memilih dan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Usia pemilih pemula dimulai pada kurun 17 sampai dengan-21 tahun. Dalam konteks sekarang, usia tersebut merujuk pada Generasi Z yakni generasi yang lahir pada tahun 1997-2012. Pada pemilu 2024, Generasi Z termasuk dalam 60% kelompok pemilih bersama dengan generasi milenial (Hamid & Hamim, 2023).

Strategi dari politisi adalah dengan memanfaatkan platform digital media sosial dalam mengekang dan mendistorsi para warga pemilih muda. *“Politicians of all levels—national and local and political parties in Southeast Asia have increasingly integrated social media platforms into their political communication strategies, significantly impacting electoral politics in the past decade. This section delves into an empirical and analytical exploration of how politicians and political parties utilize social media platforms for marketing and campaigning, particularly in electoral politics. It highlights their role in shaping voter engagement, disseminating information, and influencing and even manipulating public discourse (Lim, 2025).”* Kaum muda berada pada jumlah dominan yang dibidik oleh para elit politik dengan mengemas data- dan informasi fantastis melalui platform media sosial, sehingga kawula muda perlu dibekali dengan kecakapan digital (Triratnawati et al., 2022).

Secara dikotomis, jaringan kekuasaan sebagai pihak yang mengeruk untung dari tampilan statistik sedangkan warga sipil justru terabaikan. Data statistik survei pemilu memiliki hasil yang beragam. Kecurigaan publik muncul mempertanyakan upaya permainan statistik untuk menyelubungi kedok politis dan rekayasa ruang kesadaran publik yang lalu memberi keuntungan penguasa. Data direduksi menjadi medium kekuasaan. Faktanya, jaringan kekuasaan punya akses memproduksi data dan informasi sehingga pada gilirannya andil dalam mengonseptualisasikan teknologi politis untuk menelurkan geneologi kekuasaan. Oleh sebab itu, perlu dibuka kanal kritis menyikapi teknologi kuasa sebagai rambu awasan terhadap *big data* yang belakangan diglorifikasi sebagai ritus kebenaran mendata, sekaligus teror kebencian. Teknologi politis lantas dilokalisasikan pada warga pemilih pemula—sebuah kombinasi persilangan yang apik antara kuasa, pengetahuan, dan data atau infomasi.

Survei pemilihan umum telah memonopoli situasi sosial melalui tafsir tunggal metadata. Data yang hadir diinsafi sebagai dimensi tunggal dan absolut yakni suatu logika logosentrisme yang rentan terperosok pada dogmatisme. Alhasil pertentangan dan tumpang tindih data di antara lembaga survei itu mengisyaratkan pemanfaatan konsep dan metode yang berbeda-beda. Data karena itu telah menjadi lokasi persembunyian kepentingan setiap pihak. Jalan keluar dari kemelut tersebut adalah mengembalikan demokrasi partisipasi sebagai yang vital di dalam pemilihan kebijakan (Kellermann, 2022; Trenggono, 2018; Zenker et al., 2024).

Bertolak dari konstruksi polemik demokrasi kontemporer dan mobilisasi identitas dalam beragam cara, maka penting diupayakan secara terus-menerus model fasilitasi bagi pemuda sebagai bagian dari pencerahan dan diseminasi politik rasional yang dapat menumbuhkan dan memperkuat kecerdasan sera nalar kritis (Khaldun et al., 2026; Satriawan et al., 2020). Salah satu elemen masyarakat yang besar pengaruhnya dalam partisipasi pemilu adalah elemen pemuda (Redhani et al., 2020).

Oleh sebab itu, Program *Lingkar Ngopi Demokrasi* ini dilaksanakan sebagai solusi kritis terhadap kedaruratan demokrasi Indonesia dengan menyasar para siswa SMK Negeri 7 yang menempuh pendidikan dalam model kejuruan. Dengan keadaan penggodokan untuk prospek ke dunia kerja seperti itu menyebabkan para siswa musti ditantang lebih cepat untuk meneropong pasar ketenagakerjaan berikut kebijakan publiknya. Idealisme harus dibangun dengan mendekatkan jarak pada realitas politik yang andil dalam menentukan keputusan. Alhasil, kegiatan penginderaan disinformasi ini menjadi wahana deliberasi para siswa taruna/i mengatasi ketimpangan dan menciptakan keadilan sosial melalui tindakan partisipatif (Iswardhana et al., 2023).

Para siswa sebagai calon nahkoda yang pasti jaya di laut idealnya musti mempunyai peran dalam menjaga kekayaan dan kedaulatan maritim Bangsa Indonesia. Penginderaan yang baik terhadap disinformasi, propaganda, manipulasi, dan berita bohong menjadikan siswa sebagai corong pengetahuan bagi para pelaku maritim dan kelautan. Dalam konteks kebutuhan inilah metode fasilitasi literasi politik bagi siswa SMK Negeri 7, sedemikian krusial untuk dilaksanakan, sebagai instrumen pembelajaran melalui peningkatan kesadaran partisipatif-reflektif dalam sinergi dengan *stakeholders* dan peserta pemilu secara menyeluruh.

Program Lingkar Ngopi (LND) Demokrasi tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan pemilih pemula mengenai demokrasi, pemilu, serta bahaya disinformasi, tetapi menyiapkan kapasitas warga negara yang kritis, reflektif, dan bertanggung jawab dalam ruang demokrasi. Pendekatan Komunikasi Antarpersonal (KAP) yang diterapkan melalui teknik fasilitasi dialogis mendorong terciptanya proses belajar yang partisipatif, terbuka, dan menyenangkan, sehingga peserta tidak sekadar menerima informasi, tetapi

mampu menguji, mendiskusikan, dan merefleksikan berbagai isu elektoral secara mandiri.

Teknik fasilitasi LND diarahkan untuk memperkuat kecakapan peserta, seperti berpikir kritis, komunikasi dialogis, kolaborasi, literasi digital, pengambilan keputusan, dan partisipasi demokratis, sekaligus meningkatkan kemampuan pelajar berupa kemampuan mengidentifikasi disinformasi, memverifikasi informasi politik, menganalisis praktik oligarkis dalam kontestasi elektoral, serta memahami prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan berkontribusi dalam membentuk pemilih pemula yang memiliki literasi demokrasi yang baik, tangguh terhadap disinformasi, dan mampu berpartisipasi secara cerdas, kritis, serta bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

## B. METODE PELAKSANAAN

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah siswa SMK Negeri 7 Kota Kupang yang tergolong sebagai pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2024. Peserta merupakan siswa kelas XI dan XII yang secara administratif telah memenuhi atau mendekati syarat usia untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan umum. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang siswa yang dipilih secara purposif oleh pihak sekolah dengan mempertimbangkan keterwakilan kelas serta minat mengikuti kegiatan literasi demokrasi. Pemilih pemula dipilih sebagai mitra karena merupakan kelompok yang rentan terhadap disinformasi politik, hoaks digital, serta pengaruh opini yang berkembang di media sosial, namun sekaligus memiliki potensi besar sebagai agen demokrasi yang kritis dan partisipatif.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan Komunikasi Antarpersonal (KAP) yang dikombinasikan dengan teknik fasilitasi partisipatif, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*), dialog interaktif, serta studi kasus diskursus pemilu dan demokrasi kontemporer Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk menciptakan suasana belajar yang egaliter, komunikatif, dan menyenangkan sehingga peserta terdorong untuk bertukar pengalaman, menyampaikan pandangan, mengajukan pertanyaan, serta melakukan refleksi kritis terhadap berbagai isu mengenai demokrasi, pemilu, disinformasi, dan praktik oligarki politik. Melalui konsep Program *Lingkar Ngopi Demokrasi*, proses pembelajaran dirancang menyerupai forum diskusi informal yang mengedepankan keterbukaan, kedekatan emosional, dan partisipasi aktif peserta.

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap pra-kegiatan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. *Pertama*, tahap pra-kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pihak SMK Negeri 7 Kota Kupang untuk menentukan jadwal, lokasi, serta peserta kegiatan. Selanjutnya dilakukan identifikasi kebutuhan mitra melalui diskusi dengan guru pendamping mengenai tingkat literasi demokrasi siswa dan tantangan

yang dihadapi dalam memperoleh informasi politik. Tim pengabdian kemudian menyusun materi, instrumen evaluasi, media presentasi, studi kasus, dan skenario fasilitasi yang disesuaikan dengan karakteristik pemilih pemula agar proses pembelajaran berlangsung interaktif dan kontekstual.

*Kedua*, tahap pelaksanaan dilaksanakan melalui pembukaan kegiatan dan penyampaian tujuan program, dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai demokrasi, pemilu, disinformasi digital, serta praktik oligarki dalam kontestasi elektoral. Setelah pemaparan materi, peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan studi kasus terkait penyebaran hoaks politik, etika bermedia sosial, dan pentingnya partisipasi politik yang bertanggung jawab dan deklarasi tahu, tanggap, dan tangguh demokrasi sebagai komitmen akhir peserta. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, kemudian difasilitasi melalui dialog terbuka dan refleksi bersama sehingga terjadi pertukaran ide, klarifikasi informasi, serta penguatan pemahaman secara kolaboratif. Seluruh rangkaian kegiatan dikemas dalam suasana santai melalui konsep *Lingkar Ngopi Demokrasi* yang menempatkan fasilitator sebagai mitra dialog, bukan sekadar penyampai materi.

Dalam Metode KAP (Komunikasi antar Personal), komunikasi mengutamakan usaha saling mendengarkan, kontak mata, senyum, komunikasi dengan bahasa lokal, dan kalibrasi. Presentasi materi tentang demokrasi bagi para siswa ialah bagaimana edukasi pagi peserta untuk menggunakan hak berdemokrasi dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan konstitusi yang berlaku, kemudian pemilih pemula harus dibekali dengan nilai-nilai yang baik dalam berdemokrasi untuk memiliki karakter atau berwawasan kebangsaan. Diskusi interaktif atau berbagi pendapat di antara para peserta dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator yang dalam hal ini adalah dosen pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

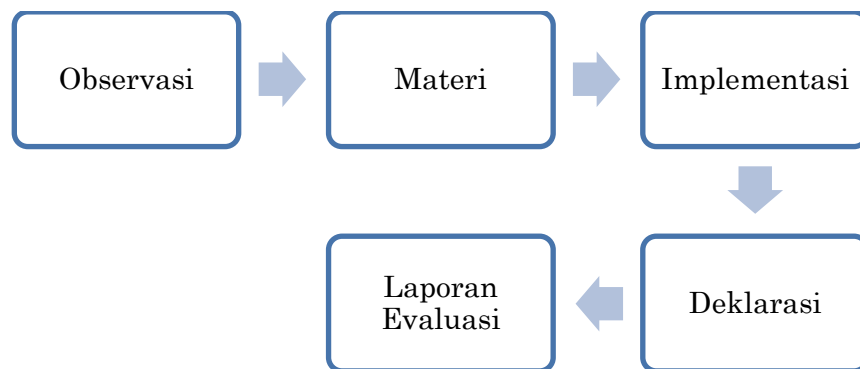
KAP (Komunikasi antar Personal). memungkinkan tercipta suasana perbincangan yang belum terbentur oleh kepentingan pragmatis dan oportunis jika:

1. Setiap pihak mendapat kesempatan dengan setara untuk mengawali diskursus dan saat berlangsung dialog itu memiliki kesempatan yang setara untuk mengungkapkan pikiran dan menegasi pikiran-pikiran partisipan itu;
2. Pada masing-masing partisipan belum memiliki diferensiasi kuasa sehingga bisa mengurangnya kalau pikiran-pikiran yang sungguh valid sedapat mungkin diutarakan pula, dan akhirnya;
3. Setiap partisipan mengajukan pemikirannya secara tepat, benar, dan jujur (*ikhlas*), sehingga tertutup potensi terjadinya yang lain memperlakuk yang satu tanpa diinsafi masing-masing.

Melalui metode ini dapat memberikan proses pendidikan warga negara yang memastikan terjadinya reformasi sosiologis menuju warga negara komunikatif. Para peserta akan dituntun untuk menemukan suatu kebenaran yang valid. Namun di saat yang sama akan terus berproses karena kebenaran itu selalu parsial, jamak, dan partikular sebagaimana telah ditandaskan para pemikir poststrukturalisme.

*Ketiga*, tahap evaluasi bertujuan mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kapasitas peserta. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap tingkat keterlibatan peserta selama diskusi, pertanyaan reflektif untuk mengukur perubahan pemahaman dan persepsi mengenai demokrasi serta disinformasi, dan wawancara singkat dengan beberapa peserta dan guru pendamping untuk memperoleh umpan balik mengenai manfaat kegiatan. Hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif sebagai dasar untuk menilai ketercapaian tujuan program, mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki, serta merumuskan rekomendasi pengembangan kegiatan literasi demokrasi bagi pemilih pemula pada masa mendatang.

Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini merupakan rangkaian tahapan yang dilakukan secara berkesinambungan. Metode pelaksanaan program *Lingkar Ngopi Demokrasi*: Penginderaan Disinformasi bagi siswa SMK Negeri 7 Kota Kupang ini secara spesifik dilakukan dengan beberapa rangkaian atau tahapan kegiatan, yaitu mulai dari observasi lapangan, penyusunan materi, pembuatan konsep fasilitasi, pelaksanaan fasilitasi, deklarasi tahu, tanggap, dan tangguh demokrasi, dan publikasi serta pelaporan, seperti terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Alur Kegiatan Pengabdian: Lingkar Ngopo Demokrasi (LND),  
Sumber: Tim Pengabdian, 2024.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik fasilitasi ini dikemas dalam konsep Lingkar Ngopi Demokrasi (LND) di mana setiap peserta berbicara dan mengekspresikan pendapat secara deliberatif dalam menyelidik problem-problem pemilu dan menggugah wawasan kebangsaannya. Lingkar Nopi Demokrasi ini diselipkan dengan permainan-permainan sehingga situasi materi menjadi luwes, impresif, dan tidak monoton. Dalam posisi duduk melingkar, peserta dapat mengambil

tempat secara setara. Hanya dalam kesetaraan peserta bisa mengemukakan ideal-ideal dari pikirannya. Lingkaran menggambarkan kesatuan dan ketidakterputusan. Sedangkan term “Ngopi” bukan terbatas pada entitas materi (aktivitas minum) tetapi memiliki pemaknaan “ngobrol pintar” yaitu dengan mengunggulkan rasionalitas sebagai alat tukar dominan dalam perbincangan. Dan, melalui terminologi demokrasi ialah jalan untuk mencapai konsensus, tetapi bukan pemahaman yang sekali jadi. Proses konsensus diwarnai dialektika dengan menciptakan situasi ide yang dapat saling bernegasi untuk menemukan kebenaran tertinggi dan kebaikan bersama.

Pelaksanaan kegiatan LND dari hulu ke hilir dilakukan secara berkesinambungan. *Pertama*, tahap pra-kegiatan difokuskan pada proses identifikasi kebutuhan mitra, koordinasi dengan pihak SMK Negeri 7 Kota Kupang, serta penyusunan desain kegiatan pengabdian. Koordinasi dilakukan bersama kepala sekolah dan guru pendamping untuk menentukan peserta, waktu pelaksanaan, serta mekanisme kegiatan yang sesuai dengan karakteristik pemilih pemula. Berdasarkan hasil diskusi awal, diperoleh informasi bahwa sebagian besar siswa telah memperoleh informasi mengenai pemilu melalui media sosial, namun belum memiliki kemampuan yang memadai dalam membedakan informasi yang valid dengan disinformasi maupun memahami secara kritis-praktik oligarkisasi media yang berkembang menjelang Pemilu 2024. Kondisi tersebut menjadi dasar penyusunan materi mengenai demokrasi, literasi digital, disinformasi politik, dan dinamika elektoral-oligarkis.

Pada tahap ini, tim pengabdian juga menyiapkan media pembelajaran, studi kasus, instrumen evaluasi, serta skenario fasilitasi berbasis Komunikasi Antarpersonal (KAP). Persiapan tersebut bertujuan menciptakan ruang dialog yang partisipatif sehingga peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu membangun pengetahuan melalui proses interaksi dan pertukaran pengalaman. Tahap pra-kegiatan menjadi fondasi penting karena memastikan bahwa seluruh materi dan metode pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan riil mitra.

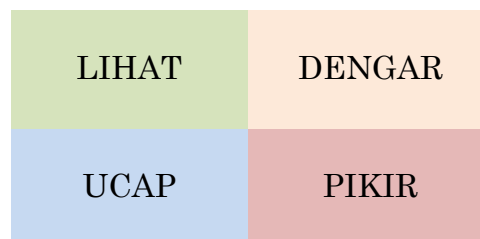
*Kedua*, pelaksanaan kegiatan dikemas melalui Program *Lingkar Ngopi Demokrasi*, yaitu forum dialog interaktif yang mengedepankan komunikasi dua arah, suasana egaliter, dan partisipasi aktif peserta. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban pemilih pemula, karakteristik disinformasi politik, serta pengaruh oligarki dalam proses elektoral. Berbeda dengan metode ceramah konvensional, penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan memanfaatkan contoh-contoh aktual, pertanyaan pemantik, dan studi kasus yang dekat dengan pengalaman peserta sebagai pengguna media sosial.

Selanjutnya peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan berbagai isu, seperti penyebaran hoaks politik, etika bermedia sosial, politik identitas, serta pentingnya verifikasi informasi

sebelum menentukan pilihan politik. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian difasilitasi melalui dialog terbuka sehingga terjadi proses klarifikasi, argumentasi, dan refleksi bersama. Pola komunikasi tersebut mendorong peserta untuk mengemukakan pendapat secara terbuka, menghargai perbedaan pandangan, serta membangun kemampuan berpikir kritis terhadap informasi politik yang beredar di ruang digital.

Pendekatan Komunikasi Antarpersonal (KAP) terbukti mampu menciptakan suasana belajar yang lebih cair dan dialogis dibandingkan metode penyuluhan satu arah. Interaksi yang intensif antara fasilitator dan peserta memperkuat proses pembelajaran karena pengetahuan dibangun melalui pengalaman, diskusi, dan refleksi bersama. Dengan demikian, Program Lingkar Ngopi Demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang pendidikan demokrasi yang mendorong partisipasi aktif dan literasi politik pemilih pemula.

Pembahasan dalam pelaksanaan LND dibagi dalam segmen-segmen dengan durasi yang telah ditentukan sehingga peserta tidak jenuh dan lebih mudah untuk mencerna materi. Dalam memetakan persoalan pemberitaan yang bertebaran di media masa, para peserta dibantu dengan peta empati untuk melakukan penginderaan disinformasi secara kritis, seperti terlihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Peta Empati, Sumber: Tim Pengabdian, 2024.

Masing-masing jendela/kuadran dari Peta Empati didiskusikan oleh peserta dengan merujuk pada pengalaman empiris (Gambar 3). Para siswa dapat mengisi setiap jendela/kuadran pada peta empati berdasarkan setiap informasi/berita dan kemudian menggunakan kemampuan mengindera untuk memahami dan menganalisis kasus. Berikut petunjuk dari peta empati di atas:

1. **Lihat:** Kuadran ini berisi penginderaan peserta terhadap observasi kasus empiris. Dalam banyak kasus berkonsekuensi pada kerenggangan yang dialami warga.
2. **Dengar:** Kuadran ini menampilkan isyarat atau pesan-pesan simbolik sekaligus penanda dari cerita di sekolah, warung kopi, pangkalan ojek, pasar, terminal, halte bus, atau di komplek tetangga. Berita/informasi mengalami perluasan tafsir dari berbagai sumber yang didengarkan peserta.

3. Pikir: Peserta kemudian merenungkan berbagai kasus partikular dalam kerangka demokrasi dan kebebasan menentukan pilihan politik.
4. Ucap: Setelah mencermati seluruh kasus, di kuadran ini peserta membangun komitmen melalui tindakan linguistiknya untuk memutus rantai kesenjangan informasi.



**Gambar 3.** Simulasi Peta Empati, Sumber: Tim Pengabdian, 2024.

Hasil dari Peta Empati menjadi bahan refleksi bersama. Dari Peta empati di atas kemudian dilanjutkan dengan permainan/gim distorsi informasi. Pada segmen ini para siswa (peserta) bermain/gaming dan mensimulasikan bagaimana setiap informasi yang diproduksi oleh orang pertama ternyata mengalami distorsi dan pergeseran makna sampai pada pihak yang kesekian atau komunikasi terakhir. Pada bagian ini pula dilakukan dengan menggunakan “clue” baik secara audio maupun visual. Adapun tujuan gim/permainan tersebut yaitu untuk memahami situasi informasi ketika mengalami distorsi. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan peserta yaitu:

1. Peserta tidak boleh mengucapkan sepatah-kata pun selama gim berlangsung
2. Peserta akan menepuk pundak peserta lain di depannya untuk menyampaikan pesan
3. Peserta diminta untuk berdiri dan berbaris membelakangi fasilitator (bukan berbaris melingkar)
4. Peserta paling dekat dengan fasilitator ditunjukkan video gim
5. Peserta pertama menirukan lebih dahulu gerakan dari video yang ditunjukkan
6. Peserta lalu menyampaikan gerakan ke peserta lain sampai peserta paling depan
7. Setelah semua peserta melakukan gerakan, peserta pertama dan terakhir menunjukkan gerakan
8. Dimulai dengan peserta terakhir (yang melihat video) melakukan gerakan
9. Bandingkan dengan peserta pertama yang melakukan gerakannya

Dari gim di atas siswa memperoleh *lesson learned* yaitu bahwasannya informasi digital umumnya bergerak di ruang tertutup menyerupai pola berbaris. Namun, kerentanan untuk cela informasi sering terjadi. Masing-masing orang tentu saja memiliki persepsi. Sehingga dengan mudah potensi distorsi informasi bisa terjadi apalagi di saat pemilu yang sarat dengan kepentingan pragmatis elite dan oligarki.

*Ketiga*, evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif selama kegiatan berlangsung, refleksi tanggapan peserta, serta wawancara singkat dengan siswa dan guru pendamping. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta terlibat aktif dalam diskusi, mengajukan pertanyaan, serta mampu memberikan tanggapan kritis terhadap berbagai isu yang dibahas. Antusiasme peserta juga terlihat dari tingginya partisipasi dalam penyelesaian studi kasus dan penyampaian pendapat pada sesi refleksi.

Berdasarkan hasil refleksi dan wawancara, peserta menyatakan bahwa metode dialog interaktif lebih mudah dipahami dibandingkan pembelajaran satu arah karena memberikan kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, dan menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya memverifikasi informasi politik, mengenali karakteristik disinformasi, serta memahami pengaruh kepentingan politik dan oligarki dalam proses demokrasi. Selain meningkatkan literasi demokrasi, kegiatan ini memperkuat kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan sebagai bagian dari penguatan *soft skills*, sekaligus meningkatkan *hard skills* berupa kemampuan mengidentifikasi disinformasi dan menganalisis isu-isu elektoral secara lebih objektif.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan Komunikasi Antarpersonal melalui Program *Lingkar Ngopi Demokrasi* efektif dalam membangun ruang belajar yang partisipatif, meningkatkan literasi demokrasi, serta memperkuat kapasitas pemilih pemula dalam menghadapi tantangan disinformasi politik menjelang Pemilu 2024. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan demokrasi akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui proses dialog, partisipasi aktif, dan pembelajaran kontekstual yang dekat dengan pengalaman peserta, seperti terlihat pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Suasana Fasilitasi LND Kelompok I dan Kelompok II,  
Sumber: Tim Pengabdian, 2024.

Di dalam spektrum demokrasi, informasi adalah sumber daya dominan yang dibutuhkan para praktisi untuk meraih basis dukungan elektoral. Setiap informasi dapat dimanfaatkan secara impresif sekaligus negatif tergantung kepentingan. Modal informasi menjadi variabel penentu untuk perebutan suara dalam formasi pemilu proporsional dengan daftar stelsel terbuka. Lewat resim informasi seyogianya menampilkan ideal-ideal demokrasi tetapi resim uang tampil lebih mengekang dan cenderung distorsif mengganti kualitas dari sebuah ide. Konsekuensi logisnya adalah warga mengukur jenis informasi dengan harga material yang mungkin diperoleh dari para konglomerasi/industri media. Begitu juga hak suara warga dikomersialisasi bahkan diobral murah. Harga diri warga negara diobral sama padahal pemilu adalah suatu perjalanan merawat ide (Mariana, 2009).

Oleh sebab itu, terdapat dua usaha dalam konteks mengentas gap informasi, *pertama*, mendekonstruksi wacana informasi, dan *kedua* adalah mengonstruksi informasi yang kredibel dan independen. Usaha konsekuen dalam pemilu adalah bukan untuk sibuk mendiskusikan desain pemilu, kecurangan pemilu, padahal dimensi yang absen dari kosakata demokrasi adalah radikalisasi perjuangan hegemonik untuk merebut dimensi kewargaan inklusif-informatif (Juru, 2013). Diskusi kewargaan inklusif hadir untuk mendekonstruksi jejak kerentanan dan kecurangan terpola.

Operasi kekuasaan menciptakan jejaring peraturan sehingga menjinakan dimensi aktus dan nalar publik. Manipulasi informasi menjadi bahasa kemenangan terhadap reduksi dimensi demokrasi kita. Kekuasaan secara intens dan produktif merepresentasikan diri secara totalistik. Pada akhirnya warga terbenam dalam ilusi prosedural yang disangka telah merangkum perbedaan. Penunggalan realitas kepemiluan dengan sendirinya mengabaikan berbagai kondisi moral dan karakter bangsa.

Fenomena pemilik media adalah konglomerat yang juga pelaku politik. Untuk mengonfrontir informasi, mereka memanfaatkan uang, kekaisaran media, partai politik, perusahaan, untuk menjalankan strategi politik pertahanan kekayaan (Mellaz & Pipit, 2018). Titik tolak untuk memahami dominasi dan distorsi informasi kontemporer ialah menyadari bahwa

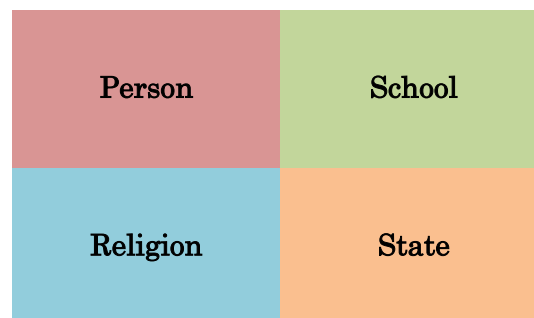
kesenjangan informasi yang ekstrim menyebabkan ketidaksetaraan dan kesenjangan keagenan politik yang juga ekstrem. Sumber daya informasi adalah media yang nampak serba guna, tidak terbatas, luwes, dan produktif, seperti terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Sampel Jaringan Media dan Partai Politik,  
Sumber: Tim Pengabdian, 2024

| Sumber Daya Media    | Partai Politik                |
|----------------------|-------------------------------|
| Visi Media Indonesia | Partai Golkar, Gerindra, etc. |
| MNC                  | Perindo, PDIP, etc.           |
| Media Group          | Partai Nasdem, PKB, etc       |

Semakin tidak meratanya distribusi informasi dan semakin dibesarkan besarnya perbedaan pemberitaan maka semakin intens mewarnai pengaburan makna di level para pemilih pemula. Kesenjangan informasi inilah yang membentuk dan mendominasi serta mendistorsi politik dan demokrasi. Kekuasaan informasi adalah kekuatan dengan begitu berpengaruh selama masa pemilu. Di dalam praktik demokrasi dagangan, informasi bisa dikooptasi elit politik untuk mempertahankan *status quo* dengan sekali lagi berpihak pada kontrol informasi.

Oleh sebab itu, hanya melalui partisipasi kewargaan para pemilih pemula (siswa SMK 7 Kota Kupang) dapat difasilitasi dengan peta imajinasi di mana setiap kuadran/jendela harus diisi tentang apa yang akan menjadi imajinasi/mimpi/harapan untuk proses perbaikan demokrasi dan politik pemilu yang lebih baik ke depan. Dimulai dari mimpi atau harapan sebagai *person*, untuk *school*, untuk *religion*, dan harapan untuk *state*, seperti terlihat pada Gambar 5.



**Gambar 5.** Peta Imajinasi, Sumber: Tim Pengabdian, 2024.

Alhasil, segmen terakhir dari Peta Imajinasi dibuktikan dengan kapasitas para peserta yang dianggap sudah memiliki seluruh komponen untuk melibatkan diri dalam demokrasi yang deliberatif. Para siswa sudah menjadi Tahu, Tanggap, dan Tangguh. Dengan demikian benang merah dari Lingkar Ngopi Demokrasi ialah pengindraan disinformasi tentang Pemilu dengan tiga kompetensi para siswa yaitu, mereka: Tahu-tahapan dan

informasi Pemilu; Tanggap-isu dalam demokrasi dan politik; serta Tangguh-mengindra isu berpotensi hoaks dan tidak berimbang.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Penginderaan disinformasi bagi pemilih pemula di SMK Negeri 7 Kota Kupang bertujuan untuk mendialogkan secara interaktif, menyenangkan, dan *engage* dengan topik seputar Pemilu dan Demokrasi. Pencerahan tentang diskursus kepemiluan dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat secara luas, terutama kelompok *first time voters* yang masuk dalam kategori pemilih generasi muda. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), jumlah pemilih muda tahun 2024 mencapai 52 persen dari total 204 juta pemilih. Data tersebut menunjukkan bahwa suara kaum muda menjadi determinator bagi kemenangan presiden, wakil presiden dan parlemen di dalam pemilihan umum (pemilu) 2024.

Program *Lingkar Ngopi Demokrasi* (LND) ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan urgen yang dihadapi dari kesimpangsiuran informasi yang mengkooptasi perilaku memilih kelompok muda, antara lain disebabkan oleh: Pertama, pemberitaan di media sosial yang tidak berimbang; Kedua, praktek kampanye negatif di masyarakat yang terdistosi oleh oligakisasi media; dan Ketiga, Sikap antipati atau ketidakpedulian kaum muda terhadap politik sebagai akibat propaganda media. Oleh karena itu pengabdian (PkM) LND ini menjadi krusial untuk mengembalikan kepercayaan dan optimisme kelompok muda kepada proses demokrasi dan pemilihan umum.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Manusia adalah makhluk yang berhutang budi. Menyetir adagium tersebut berkenankan Penulis menyampaikan limpah terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Katolik Widya Mandira yang menjadi penyandang dana untuk terlaksana dharma pengabdian ini. Nada terima kasih yang sama juga kepada pihak SMK Negeri 7 Kota Kupang yang bersedia menjadi mitra kritis dan akhirnya kepada para tim PkM mahasiswa Ilmu Pemerintahan, sidang pembaca serta yang terhormat Dewan Redaksi Jurnal Masyarakat Mandiri sebagai media diseminasi pikiran dan aksi kami, Fiat Lux!

#### **PERNYATAAN BEBAS KONFLIK KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa naskah ini terbebas dari segala bentuk konflik kepentingan dan diproses sesuai ketentuan dan kebijakan jurnal yang berlaku untuk menghindari penyimpangan etika publikasi dalam berbagai bentuknya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al Hamid, S., & Hamim, U. (2023). Sosialisasi Literasi Politik dalam Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Bolangitang Timur. *Jurnal Pengabdian Pedagogika*, 01(02), 67–78.
- Al Izzati, R., Dartanto, T., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2024). Direct elections and trust in state and political institutions: Evidence from Indonesia's election reform. *European Journal of Political Economy*, 85(June), 102572. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102572>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale (Elections, Clientalism, and the State in Indonesia)* (Vol. 32, Issue 3). Cornell University Press.
- Engler, S. (2016). Why be critical? Introducing a symposium on Capitalizing Religion. *Religion*, 46(3), 412–419. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2016.1192831>
- FORSTER, G. (2005). *John Locke's Politics of Moral Consensus*. Cambridge University Press.
- Grindle, M. S. (2009). Going local: Decentralization, democratization, and the promise of good governance. In *Going Local: Decentralization, Democratization, and the Promise of Good Governance*. <https://doi.org/10.1355/ae27-3j>
- Hadiz, V. R. (2024). Still the “Opium of the Masses”? Religion and Labour Struggles in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 0(0), 1–22. <https://doi.org/10.1080/00472336.2024.2311075>
- Iswardhana, M. R., Zakinah, M., Maharani, G. A., Tayan, W. G., & Nuraini, A. (2023). Kampanye Gunakan Hak Suara dan Jangan Golput pada Pemilu 2024 Untuk Generasi Muda. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 117–122. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i1.2014>
- Juru, I. J. (2013). Dislokasi wacana kewarganegaraan: Melampaui liberalisme menuju wacana agonistik. *Yogyakarta: Polgov*.
- Kellermann, K. L. (2022). Political inequality, political participation, and support for populist parties. *Constitutional Political Economy*, 33(4), 461–482. <https://doi.org/10.1007/s10602-021-09357-3>
- Khaldun, R., Supriadi, L., & Mujib, B. (2026). *Pendampingan Penguatan Toleransi dan Moderasi Beragama Pemuda melalui Karang Taruna di Desa Dasan Tapen Kabupaten Lombok Barat*. 10(2), 2732–2743.
- Lesmana, D., & Marta, R. F. (2022). Transfer of communications knowledge: Literacy of media conglomeration in high school students. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 7(3), 575–588. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v7i3.7398>
- Li, D. E. (2025, August). Watak Kekuasaan dan Populisme Tertutup Prabowo. *Tempo.Co*.
- Lim, M. (2025). Social Media and Politics in Southeast Asia. In *Social Media and Politics in Southeast Asia* (Vol. 2998). <https://doi.org/10.1017/9781108750745>
- Mariana, D. (2009). *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia*. AIPI.
- Mellaz, A., & Pipit, R. K. (2018). Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik (Studi Literatur untuk Rekomendasi Kebijakan Pendanaan Partai Politik di Indonesia.". In *Sindikasi Pemilu dan Demokrasi*.
- Mietzner, M. (2026). *Ruling Indonesia Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition*. University of Michigan Press.
- Niron, E. S., Pantola, B. R. S., Pena, V. R., & Dhosa, D. D. (2026). *Pelatihan Tata Kerja dan Pola Hubungan Komisioner-Sekretariat Bawaslu dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemilu Demokratis*. 10(2), 1–4.
- Penyusun, T. I. M., & Fahlefi, M. R. (2024). *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Indeks Partisipasi Pemilu 2024*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Redhani, M. E., Fitri, M. S., Khalid, A. K., & Hanafi, H. (2020). Sosialisasi Pemilu

- Kepada Pemuda Guna Menciptakan Pemuda Yang Sadar Pemilu Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlâs*, 6(1), 118–123. <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v6i1.3372>
- Satriawan, I., Gunawan, Y., Sulaiman, K. F., & Hafiz, M. B. A. (2020). Pemilihan Pemula “Cerdas Pemilu.” *J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 122–126. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v5i2.1468>
- Trenggono, N. (2018). *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia*. Asnalitera Yogyakarta.
- Triratnawati, A., Hidayah, S., & Lazuardi, E. (2022). 'Menjadi Pelajar Cakap Digital': Proyek Bersama Webinar dan Sosialisasi Kecerdasan Digital di Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. *Bakti Budaya*, 5(1), 10–24. <https://doi.org/10.22146/bakti.4040>
- Warburton, E. (2024). Private Power and Public Office: The Rise of Business Politicians in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 56(2), 184–206. <https://doi.org/10.1080/14672715.2024.2334069>
- Widiantari, K. S., & Putra, A. A. N. P. (2025). Pemanfaatan Sosial Media Guna Mendukung Kemajuan Demokrasi pada Pemilihan Pemula Dalam Pemilu Tahun 2024. *Bakti Budaya*, 8(1), 28–39. <https://doi.org/10.22146/bakti.12570>
- Winters, J. (2026). *The Blind Spot How Oligarchs Dominate Our Democracy*. SCRIBNER.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy* (J. A. Winters (ed.); 1st ed.). Cambridge University Press.
- Zenker, F., van Laar, J. A., Cepollaro, B., Gâță, A., Hinton, M., King, C. G., Larson, B., Lewiński, M., Lumer, C., Oswald, S., Pichlak, M., Scott, B. D., Urbański, M., & Wagemans, J. H. M. (2024). Norms of Public Argumentation and the Ideals of Correctness and Participation. *Argumentation*, 38(1), 7–40. <https://doi.org/10.1007/s10503-023-09598-6>